

EDUKASI KEBANGSAAN PEMILU DAMAI PEMILU DEMOKRATIS DI KELURAHAN KRATONAN TAHUN 2024

NATIONAL EDUCATION PEACEFUL ELECTIONS DEMOCRATIC ELECTIONS IN KRATONAN DISTRICT IN 2024

¹M. Yunan Hidayat, ²Taufiq Usman, ³Sukari

¹Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

²Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Korespondensi: M. Yunan Hidayat. Alamat email: m.yunanhidayat@iimsurakarta.ac.id

ABSTRAK

Demokrasi pada dasarnya adalah suatu proses bernegara yang berdasarkan pada peranan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi mencakup tiga prinsip dasar: negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. artinya, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang diakui dan didukung oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pemerintah dalam menjalankan menjalankan kekuasaannya berada dalam pengawasan rakyat. Begitu pula di Indonesia, akan menunjukkan sebuah tumbuh dan berkembang kedewasaan hendaknya menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang dan indah. Praktik demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat akan memperkuat karakter negara bangsa yang baik. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus menolak dan mencegah taktik politik destruktif agar efisiensi perekonomian dan stabilitas nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini. Pemilu yang damai merupakan harapan dan cita-cita semua negara, termasuk bangsa Indonesia. Berbagai kegiatan, termasuk edukasi dan diskusi, diselenggarakan oleh aktor-aktor dalam negeri Indonesia dengan tujuan agar pemilu dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada hambatan atau permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan di negara ini.

Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

Democracy is basically a state process based on the role of the people as the holder of supreme sovereignty. Democracy includes three basic principles: a state of the people, by the people, and for the people. that is, a legitimate government is a government that is recognized and supported by the majority of the people through democratic mechanisms such as general elections and exercises power on behalf of the people and the government in exercising its power is under the supervision of the people. Likewise in Indonesia, it will show a growth and development of maturity that should show an increasingly mature and beautiful face of Indonesian democracy. Democratic practices that prioritize social welfare and order will strengthen the character of a good nation state. Therefore, all levels of society must reject and prevent destructive political tactics so that economic efficiency and national stability are maintained throughout this year. Peaceful elections are the hopes and aspirations of all countries, including the Indonesian nation. Various activities, including education and discussions, were organized by domestic Indonesian actors with the aim of ensuring that the elections could be held smoothly without any obstacles or problems that could cause divisions in the country.

Keywords: Democracy, Indonesia, Government, Social Welfare.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi pada hakikatnya adalah suatu proses bernegara yang berdasarkan pada peranan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, negara demokrasi mencakup tiga prinsip dasar: negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. artinya, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang diakui dan didukung oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berada dalam pengawasan rakyat.

Begitu pula di Indonesia, negara yang menganut sistem demokrasi akan segera mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilu, gerakan semangat politik pada tahun 2023 merupakan langkah awal dan persiapan pemilu tahun 2024, akan menunjukkan sebuah tumbuh dan berkembang kedewasaan hendaknya menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang dan indah. Praktik demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat akan memperkuat karakter negara bangsa yang baik. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus menolak dan mencegah taktik politik destruktif agar efisiensi perekonomian dan stabilitas nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini.

Maklum, tahun ini politik nasional semakin dinamis. Momentum tersebut merupakan bagian dari perbincangan berbagai topik politik sepanjang tahun 2022 yang ditandai dengan munculnya calon presiden baru yang diajukan oleh beberapa sektor masyarakat. Beberapa permasalahan akan menjadi lebih akut dan segera membuat politik nasional menjadi lebih dinamis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk 18 partai politik (Parpol) untuk mengikuti pemilu 2024. Dengan demikian, sepanjang tahun ini ruang publik dipastikan akan dipenuhi dengan pernyataan dan perdebatan politik atau perselisihan antar politisi dari seluruh dunia.

Motivasi politik tersebut tidak perlu dipertanyakan selama tidak mengikis atau mengganggu ketertiban umum. Masyarakat tentu berharap para politisi lebih mengedepankan pemaparan program pembangunan dan usulan solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi negara dan masyarakat. Ruang kritik terhadap pemerintah yang masih terbuka tentunya akan menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Kritik dan perdebatan etis yang berimbang akan menghadirkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang dan indah. Pematangan demokrasi yang tercermin dari eskalasi dinamika politik justru akan memperkuat karakter negara bangsa yang baik. Kondisi yang sangat menguntungkan memungkinkan mesin perekonomian negara untuk terus beroperasi. Dan seluruh lapisan masyarakat tidak segan-segan menjalankan kegiatan produksinya.

Berdasarkan harapan-harapan idealis tersebut, seluruh peserta pemilu 2024 diajak untuk mengedepankan politik berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan, yakni selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Konsekuensinya adalah menunjukkan perilaku politik yang sejalan dengan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, semua calon yang mencalonkan diri harus mengedepankan kesopanan dalam berpolitik. Simpati pemilih atau calon pemilih harus diperoleh dengan sikap dan pendekatan yang bermartabat dan santun. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak boleh dijadikan peluang perpecahan.

Dikotomi politik cenderung memecah belah persatuan dan menyulut perselisihan. Oleh karena itu, dalam diri setiap politisi harus ada kemauan untuk melepaskan diri dari dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi masyarakat ke kutub yang berlawanan. Sebaliknya, sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkesinambungan, seluruh lapisan masyarakat harus diajak untuk mengintegrasikan mata rantai persiapan pemilu ke dalam proses kematangan politik dan kematangan demokrasi. Oleh karena itu,

apapun agenda nasional, termasuk agenda pemilu untuk memilih presiden dan anggota Kongres, kepentingan bersama harus selalu menjadi pusat dan pengarah semua pihak. Oleh karena itu, taktik politik destruktif tidak dapat ditoleransi. Karakter baik negara-bangsa harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Karena kapasitas nasional merupakan sumber modal utama yang menciptakan kondisi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif guna mencapai kesejahteraan. Karena hal ini berkaitan langsung dengan persiapan pemilu 2024, suhu politik di Tanah Air kemungkinan akan lebih panas tahun ini. Menghadapi suhu politik yang meningkat, kewaspadaan kolektif harus ditingkatkan. Sebab, mungkin situasi seperti itu akan dimanfaatkan oleh oknum politik dan spekulasi yang “memancing di perairan sulit” untuk merusak stabilitas bangsa.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Menjelang tahun 2024 bagi masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan pemilu, kondisi perekonomian dan kehidupan sosial politik sebenarnya relatif stabil. Faktanya, sektor perekonomian mencapai pertumbuhan yang mengesankan. Sebuah prestasi yang membuat kagum masyarakat global. Pemilu yang damai merupakan harapan dan cita-cita semua negara, termasuk bangsa Indonesia. Berbagai kegiatan, termasuk seminar dan diskusi, diselenggarakan oleh aktor-aktor dalam negeri Indonesia dengan tujuan agar pemilu dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada hambatan atau permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan di negara ini. Dengan fenomena tersebut, Institut Agama Islam Mambaul 'Ulum Surakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, Bawaslu dan Panwaslu akan menyelenggarakan konferensi nasional dengan topik pemilu demokratis dan pemilu damai di Indonesia.

3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM ini, dilakukan pengumpulan informasi mengenai

tempat, waktu, dan perijinan dilakukannya kegiatan ini. Kemudian hasil pengumpulan informasi ini kami jadikan untuk menetapkan program. Dalam sebuah pengabdian masyarakat pasti memerlukan metode untuk mengukur keberhasilan sebuah kegiatan. metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa: (a) Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk materi sosialisasi dalam kegiatan pengabdian ini; (b) Melakukan survei lapangan ke Kelurahan Kratonan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan; (c) Kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak Kelurahan, Pengawas Pemilu kelurahan, Panwaslu Kecamatan untuk identifikasi permasalahan dalam kegiatan Seminar kebangsaan Pemilihan Umum tahun 2024 kelurahan Kratonan dengan tema Pemilu Demokratis Pemilu damai.

4. HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat agar membuahkan hasil yang maksimal, maka perlu adanya tahapan-tahapan. Ada 3 (tiga) tahapan yang perlu dilaksanakan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

1) Tahap persiapan

Sebelum memasuki tahap pelaksanaan terlebih dahulu diadakan persiapan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Pada tahap awal sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan di lapangan, Anggota Tim melakukan survey lokasi;
- b. Hasil survey anggota tim mengadakan rapat dalam rangka persiapan pembuatan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Ketua Tim mengajukan proposal rencana kegiatan Kepada Ketua

- LPPM Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta untuk di review;
- d. Hasil review dari tim reviewer proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pelaksanaan kegiatannya;
 - e. Mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan seperti:
 - (a) Pembuatan surat permohonan kepada Kepala Kelurahan Kratonan bekerja sama dengan Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta (IIM);
 - (b) Penentuan jadwal kegiatan;
 - (c) Pembuatan pamflet kegiatan;
 - (d) Pembuatan dan penyebaran undangan peserta;
 - (e) Penyiapan lokasi acara.
- 2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dibagi dalam 2 (dua) sesi kegiatan yaitu:
- a. Peserta terlebih dahulu diberikan materi dalam bentuk ceramah, tentang Pemilu damai dan Pemilu demokratis;
 - b. Melakukan tanya jawab dengan peserta sosialisasi seputar materi yang telah disampaikan bila ada yang belum difahami atau belum jelas.
- 3) Tahap Evaluasi Kegiatan
- Tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah tahapan evaluasi kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, dan sebagai pijakan untuk melaksanakan program berikutnya. Evaluasi dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:
- a. Evaluasi Struktur, hal-hal yang diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: (a) Kehadiran peserta 80% tepat waktu dalam kegiatan ini; (b) Media dan alat yang tersedia sesuai dengan perencanaan; (c) Peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang direncanakan; (d) Tempat pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Evaluasi Proses, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan; (2) Peserta dapat mengikuti acara sampai selesai; (3) Peserta mengikuti proses dengan aktif; (4) Peserta tidak ada yang meninggalkan tempat selama proses; (5) 90% dari peserta yang hadir aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung.
- c. Evaluasi hasil, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah 90% peserta memahami tentang Pemilu damai pemilu demokratis.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kratonan, maka ada beberapa kesimpulan, Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat hendaknya terus berkelanjutan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya pendampingan dari pihak terkait setelah pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan dengan baik. Bagi masyarakat peserta pengabdian masyarakat di wilayah Kelurahan Kratonan untuk bisa menindaklanjutinya. Bagi Pemerintah Kelurahan Kratonan yang sudah mendukung program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ditingkatkan lagi dengan cara memberi support warganya supaya menghindari hal hal yang bisa memecah belah bangsa. Seminar kebangsaan ini dalam rangka program Pengabdian kepada masyarakat Institut Islam Mamba'ul'ulum Surakarta di Kelurahan Kratonan berjalan dengan lancar. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat sehingga bisa terhindar dari Desintegrasi bangsa.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kelurahan Kratonan, tokoh

masyarakat dan warga Kelurahan Kratonan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian ini, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta yang telah memfasilitasi kegiatan dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

7. DAFTAR PUSTAKA

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, (2010), *Civic education : Antara realitas politik Dan Implementasi hukumnya*, Jakarta, Gramedia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 2017, tentang pemilihan Umum.

Profil Kelurahan Kratonan, https://id.wikipedia.org/wiki/Kratonan,_Serengan,_Surakarta, diakses tanggal 25 Januari 2024

Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, (2011), *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) : pendidikan politik, nasionalisme, dan demokrasi*, Bandung: Fokusmedia.

Ubaedillah A, Abdul Rozak, (2016), *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) : Pancasila demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*, Jakarta, Kencana.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.